

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 merupakan seseorang yang memimpin di suatu daerah, yang disebut kepala daerah adalah Gubernur untuk wilayah Provinsi, Bupati untuk wilayah Kabupaten dan Wali kota untuk wilayah Kota. Kepala daerah ini dalam menjalankan roda pemerintahannya, akan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 terkait dengan Pemerintahan Daerah bahwasannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.¹ Hadirnya Pilkada merupakan upaya untuk menghindari konflik politik yang terjadi. Namun kenyataannya jauh setelah terjadinya pilkada atau setelah diangkatnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi konflik politik di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Konflik Politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk dapat memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, perilaku penguasa, serta segenap aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan di antara partisipan politik. Menurut Maswadi Rauf, konflik politik bukan hanya sekedar konflik individu, karena konflik politik hal-hal yang

¹ Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dipertentangkan mengenai isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak.² Konflik politik dapat terjadi di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Konflik antara kepala daerah dan Wakil kepala daerah ini sering terjadi saat keduanya melaksanakan pemerintahannya. Setelah keduanya bersusah payah memenangkan pemilihan umum kepala daerah, saat di pertengahan masa jabatan keduanya mengalami keretakan.

Konflik Politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok serta fungsi sebagai seseorang yang menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga yang terjadi yaitu Kepala Daerah yang kurang memberikan kesempatan atau wewenang kepada Wakil Kepala Daerah. Maka, Wakil Kepala Daerah akan menuntut lebih dari ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Konflik politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terjadi juga dikarenakan kurangnya komunikasi satu sama lain. Seperti di Kabupaten Kuningan, konflik terjadi di antara Bupati dan Wakil Bupati.

Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terjadi saat keduanya sedang menjalani roda pemerintahan. Sangat disayangkan, bahwa konflik harus terjadi ditengah-tengah wabah Covid-19 melanda Kuningan. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan berasal dari partai yang sama yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, walau berasal dari partai yang sama konflik ini tidak bisa dihindari. Jika melihat kebelakang, pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, Kabupaten Kuningan memiliki tiga pasangan calon kepala daerah yaitu Acep

² Cholisim dan Nasiwan. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Hal 159

Purnama sebagai petahana Bupati Kabupaten Kuningan dengan M. Ridho Suganda yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Kuningan sebelumnya, Dudi Pamuji dengan Udin Kusnaedi dan Toto Taufikurohman Kosim yang merupakan direktur Rumah Sakit Kuningan *Medical Center* dengan Yosa Octora Santono yang merupakan anak dari anggota DPR RI Amin Santono dan Yoyoh Rukiyah Amin yang merupakan anggota dari DPRD Jawa Barat.

Tabel 1.1
Nomor Urut Peserta Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2018

Nomor Pendaftaran	Nama Bakal Pasangan Calon	Untuk Jabatan	Partai Pengusung
1	H. Acep Purnama, S.H., M.H M. Ridho Suganda, S.H., M.Si	Bupati Wakil Bupati	1. NASDEM 2. PDI-P
2	H. Dudi Pamuji, S.E H. Udin Kusnedi, S.E., M.Si	Bupati Wakil Bupati	1. GERINDRA 2. GOLKAR 3. PAN
3	dr. Toto Taufikuroham Kosim Yosa Octora Santono, S.Si., M.M	Bupati Wakil Bupati	1. PKB 2. PKS 3. PPP 4. DEMOKRAT

Sumber: KPU Kabupaten Kuningan

Acep Purnama merupakan seorang muslim yang memiliki darah Tionghoa. Beliau merupakan warga Tionghoa pertama yang menjadi bupati di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh Radar Kuningan seorang Tokoh di Kabupaten Kuningan mengatakan bahwa ia mengenal sosok Acep Purnama sebagai seorang pebisnis yang ulet, disiplin dalam mengatur waktu, memiliki gagasan yang kuat tetapi sederhana dalam berpenampilan.³

³ PojokJabar.com

Acep Purnama pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kuningan. Kemudian, beliau menjabat sebagai Bupati Kuningan selama dua periode. Pada periode pertama, Acep Purnama menggantikan Bupati Utje Ch Suganda yang wafat pada tahun 2016. Partai menugaskan Acep Purnama untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Bupati Kuningan dengan Wakil Bupatiya yaitu Dede Sembada yang merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan. Selesai menjabat sebagai Bupati Kuningan pada tahun 2016-2018, Acep Purnama mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipasangkan dengan Muhammad Ridho Suganda yang merupakan anak dari Bupati Ir. H. Aang Hamid Suganda dan Bupati Utje Ch Suganda.⁴

Mochamad Ridho Suganda merupakan anak dari Ir. H. Aang Hamid Suganda dengan Utje Ch Suganda, setelah kedua orangtuanya menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Kuningan Ridho suganda mencalonkan dirinya menjadi wakil bupati pada tahun periode 2018-2023. Sebelum datang ke Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa Ridho merupakan seorang aktivis di Kota Bogor. Ia menjabat sebagai ketua DPD Komite Pemuda Nasional (KNPI) Kota Bogor, ia juga aktif sebagai ketua Karang Taruna Bogor pada periode tahun 2016-2021. Sebelumnya, Ridho juga merupakan seorang pengusaha dan ia melakukan kegiatan-kegiatan social. Hingga akhirnya datang ke Kuningan dengan tujuannya adalah untuk meneruskan perjalanan yang telah dilakukan oleh pendahulunya, ingin

⁴ Santosa, Muhammad Alif. (2023). Mengenal Sosok Bupati Acep Purnama, Bawa Visi Kuningan MAJU, Ini Maksudnya.

meneruskan perjalanan dalam hal pembangunan serta melakukan pengabdian terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan.

Majunya Ridho sebagai wakil bupati Kuningan pada saat itu terdapat beberapa faktor di antaranya pihak PDI-P mengatakan bahwa hal pengusungan ini ada kaitannya dengan fakta bahwa Ridho merupakan keturunan dari mantan Bupati Kuningan yaitu Ir. H. Aang Hamid Suganda dan Utje Suganda. Faktor lainnya adalah melihat bahwa Ridho memiliki jiwa muda dan semangat tinggi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Kuningan. Namun berdasarkan penuturan warga hal ini berdampak pada pelayanan masyarakat yang negatif. Tapi jika dilihat dari kekuasaannya, mereka menempatkan orang-orang yang mendukung mereka di tempat yang enak dari pemda hingga di DPRD. Menurut Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat, diusungnya Ridho Suganda sebagai calon wakil bupati saat itu merupakan keputusan partai hal itu menjadi cerminan bahwa kekuasaan Ir. H. Aang Hamid Suganda masih berpengaruh.⁵

Sedangkan Ridho Suganda ini merupakan orang baru yang masih belum mengerti bagaimana perpolitikan di Kabupaten Kuningan. Sehingga seharusnya, partai seharusnya lebih kompeten dalam merekrut sosok pemimpin yang tahun mengenai seluk beluk suatu daerah yang akan dipimpin sehingga nantinya dapat menghindari Konflik perbedaan pendapat.⁶

Acep Purnama merupakan petahana yang pada periode 2013 menjabat sebagai Wakil Bupati Kuningan yang kemudian menggantikan Hj. Utje Suganda

⁵ Fadiyah,Dina, dkk. (2022). Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Hal. 23.

⁶ Ibid

menjadi Bupati Kabupaten Kuningan hingga tahun 2018 dan akhirnya mengikuti kembali pemilihan kepala daerah dengan pasangan M.Ridho Suganda yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Kuningan periode sebelumnya. Uniknya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Usai pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum atau (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar sidang pleno terbuka terkait dengan Rekapitulasi dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kuningan. Rapat tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan perolehan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Toto Taufikuroham Kosim - Yosa Octora Santono mendapatkan suara sebanyak 183.156/32.1 %. Pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dudi Pamuji - Udin Kusnedi mendapatkan suara sebanyak 155.017/27.1 %. Pasangan calon nomor urut 3 yaitu Acep Purnama - Muhammad Ridho Suganda mendapatkan suara sebanyak 233.539/40,8 %.⁷ Dari pembacaan rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU dapat dikatakan bahwa nomor urut 3 memenangkan suara terbanyak di Kabupaten Kuningan. Setelah kemenangan tersebut, keduanya resmi dilantik pada tanggal 04 Desember 2018.⁸

Melalui pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2018 maka Acep Purnama dan Ridho Suganda merupakan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten yang secara sah dapat menjalankan Pemerintahan Daerah Kabupaten

⁷ Suara Kuningan.com. (2018). Inilah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2018

⁸ Pikiran Rakyat.com. (2018). Pelantikan Bupati Kuningan Dimajukan ke Tanggal 4 Desember

Kuningan. Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kuningan keduanya sempat diisukan memiliki hubungan yang renggang. Hubungan yang renggang ini biasanya berujung pada konflik. Hal ini terjadi biasanya karena pemahaman terhadap tugas pokok serta fungsi sebagai pemimpin pemerintahan daerah kurang dipahami oleh masing-masing individu, kurangnya komunikasi satu sama lain atau hal lainnya.

Konflik politik yang terjadi di antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, mencuat ke permukaan publik. Renggangnya hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ditandai dengan ketidakhadirannya Wakil Bupati Kuningan yaitu Muhammad Ridho Suganda dalam acara mutasi Eselon III dan IV di Kabupaten Kuningan, sebanyak 242 Eselon III dan IV di Kabupaten Kuningan yang di alih tugas dalam dan dari jabatan administrasi. Ridho Suganda selaku Wakil Bupati Kuningan merasa tersinggung karena tidak dilibatkan dalam merumuskan mutasi Eselon III dan Eselon IV.⁹

Puncaknya, Ridho Suganda mengembalikan fasilitas yang diterimanya sebagai Wakil Bupati Kuningan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Adapun fasilitas yang dikembalikan adalah Rumah Dinas, berserta dengan Mobil dinasnya melalui ajudan Wakil Bupati. Beliau beralasan pengembalian fasilitas ini adalah untuk mengurangi anggaran pemerintah disaat wabah Covid melanda.¹⁰ Saat

⁹ Kuningan Terkini.com. (2021). Wabup Serahkan Fasilitas Negara ke Pemda ini Alasannya ?

¹⁰ Ripai.(2021). Fakta-Fakta Memanasnya Hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Balikin Mobil Dinas, Ada Apa ya ?

dikonfirmasi oleh pihak media, wakil bupati mengatakan bahwa ia sudah lama tidak melakukan komunikasi dengan Bupati Kuningan.¹¹

Perkembangan dari konflik politik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan adalah sudah pada tahap damai. Pada kesempatan ini PDI-P sebagai partai asal dari Aceh Purnama dan Ridho Suganda mengambil peran penting dalam usaha mendamaikan keduanya, maka perlu diketahui gaya manajemen konflik seperti apa yang digunakan PDI-Perjuangan dalam upaya mendamaikan keduanya. Peristiwa konflik ini menjadi isu yang sempat memanas. Karena bahwasannya terkait dengan rotasi eselon pegawai di Kabupaten Kuningan merupakan hak prerogatif dari Bupati Kuningan.

Dari paparan diatas, Adapun penelitian lain dijadikan sebagai referensi oleh peneliti di antaranya, “Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019” oleh Muhajir, Agustino dan Muradi (2021). Penelitian ini adalah konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara satu sama lain. Kemudian, Wakil Bupati merasa bahwa ada perjanjian yang belum dipenuhi menyangkut dengan perjanjian keduanya selama masa pencalonan, yang mana perjanjian tersebut berkaitan dengan kinerja atau kewenangan yang dimiliki keduanya. Karena dengan keseimbangan kewenangan yang diberikan hal itu dapat memberikan kontribusi bagi Wakil Bupati untuk menjalankan pemerintahan.¹²

¹¹ Bagaskara.(2021). Berselisih, Wabup Ngaku Lama Tak Komunikasi dengan Bupati Kuningan.

¹² Muhajir, Agustino dan Muradi. (2021). Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto” oleh Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebas (2018). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto mengambil permasalahan mengenai penyebab dari konflik itu terjadi dan dampak yang timbul dari konflik yang terjadi di antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Dampak dari konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto adalah adanya ketidakkompakan diantara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, hadirnya konflik baru antara pegawai pemerintahan, ada program pemerintah daerah yang tidak berjalan dengan baik dan seharusnya serta muncul konflik antara pendukung SIAP (Bupati Kabupaten Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto).¹³

Selanjutnya, penelitian dengan judul “Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012-2017” oleh Maria Ulfa Aulia (2017). Penelitian yang dilakukan di Pati mengambil masalah mengenai konflik yang terjadi menjelang Bupati Pati cuti menjelang pemilu Kabupaten Pati. Ia kembali maju dalam pemilu dan tidak didampingi oleh Wakilnya. Dengan begitu, Wakil Bupati untuk sementara waktu menggantikan Bupati dalam mengatur pemerintahan. Hadirnya konflik tersebut adalah karena adanya selisih paham terkait dengan nama-nama pejabat yang akan dilantik pada tanggal 5 Januari 2017 di lingkungan pati. Manajemen konflik yang dilakukan dalam konflik ini adalah bentuk mediasi dengan melibatkan pihak ke-3 untuk menyelesaikan konflik ini. Maka ketua DPRD Pati langsung berkoordinasi

¹³ Bebas.(2018). Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto

dengan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan konflik tersebut.¹⁴

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “KONFLIK POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN DALAM KASUS ROTASI JABATAN TAHUN 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, untuk mengetahui gaya manajemen konflik seperti apa yang digunakan PDI-Perjuangan. Serta untuk mengetahui bagaimana dampak yang muncul dari konflik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana terjadinya Konflik Politik antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada tahun 2021?
- 2) Apa Faktor penyebab terjadinya Konflik Politik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2021?
- 3) Bagaimana penanganan konflik politik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Memaparkan dan menganalisa penyebab terjadinya konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2021.
- 2) Menganalisa dampak yang muncul akibat dari konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2021.

¹⁴ Aulia. (2017). Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2017-2018)

- 3) Memahami gaya manajemen konflik yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan dalam menyelesaikan konflik antara Bupati dan Wakil Kuningan Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis
 - a. Memberikan wawasan terkait dengan gambaran konflik yang terjadi di antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2021.
 - b. Menjadi referensi dalam menentukan solusi agar konflik serupa tidak terjadi dikemudian hari.
 - c. Menjadi peningkatan wawasan akademik di Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.
- 2) Praktis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2021. Agar dapat meminimalisir untuk tidak terjadinya konflik yang sama di kemudian hari.
 - b. Mengetahui gaya manajemen konflik yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2021.
 - c. Untuk mencari solusi yang tepat dengan membuat kebijakan yang dapat menghindari konflik serupa muncul kembali.